



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Organisasi sektor publik dimana pemerintah termasuk didalamnya merupakan suatu entitas ekonomi yang menyediakan barang dan jasa publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bukan untuk mencari keuntungan finansial (Nordiawan, 2010). Dalam melaksanakan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dibutuhkan suatu penganggaran yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berfungsi untuk mendistribusikan pendapatan pemerintah secara merata dan adil, serta untuk mencegah ketimpangan ekonomi antar masyarakat dan daerah (Mahmudi, 2013).

APBN juga digunakan sebagai alat monitor masyarakat terhadap kinerja pemerintah dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah karena masyarakat merupakan pengguna barang dan layanan publik yang dihasilkan oleh pemerintah. Majunya teknologi informasi berupa internet membuat hubungan antara masyarakat dengan pemerintah semakin dekat. Dengan teknologi informasi, masyarakat dapat memantau kinerja pemerintah melalui berita dari internet seperti contoh [tribunnews.com](http://tribunnews.com). Masyarakat juga dapat mengakses situs pemerintah yang berisi berita tentang rencana kerja pemerintah dan laporan realisasi anggaran seperti contoh [depok.go.id](http://depok.go.id), [kemenkeu.go.id](http://kemenkeu.go.id), dan lain sebagainya. Selain itu, teknologi informasi juga bermanfaat bagi pihak pemerintah, seperti contoh

sebagai sarana pembayaran dan pelaporan pajak (*e-SPT*), mempermudah pendataan penduduk (*e-KTP*), serta dapat digunakan sebagai alat penyebaran informasi kebijakan secara merata ke seluruh daerah dan provinsi dalam negeri.

Selain merupakan pengguna barang dan layanan publik, masyarakat memiliki kontribusi yang paling besar atas dana yang dianggarkan untuk belanja pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan negara. Hal tersebut dapat dilihat dari pendapatan pemerintah yang paling besar berasal dari pajak yang dipungut dari masyarakat. Berikut merupakan tabel pendapatan Negara dalam Laporan Realisasi Anggaran tahun 2015:

**Tabel 1.1**

**Pendapatan Negara dalam Laporan Realisasi Anggaran 2015**

(dalam triliun rupiah)

URAIAN	APBNP*	REALISASI	
		JUMLAH	%
<b>A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH</b>	<b>1.761,6</b>	<b>1.223,1</b>	<b>69,4</b>
<b>I. PENERIMAAN DALAM NEGERI</b>	<b>1.758,3</b>	<b>1.222,3</b>	<b>69,5</b>
<b>1. PENERIMAAN PERPAJAKAN</b>	<b>1.489,3</b>	<b>1.015,6</b>	<b>68,2</b>
<b>a. Pajak Dalam Negeri</b>	<b>1.440,0</b>	<b>984,3</b>	<b>68,4</b>
i. Pajak Penghasilan	679,4	496,1	73,0
- Migas	49,5	46,3	93,4
- Non - Migas	629,8	449,8	71,4
ii. Pajak Pertambahan Nilai	576,5	350,7	60,8
iii. Pajak Bumi dan Bangunan	26,7	25,3	94,8
iv. BPHTB	0,0	0,0	0,0
v. Cukai	145,7	107,3	73,6
vi. Pajak lainnya	11,7	4,9	41,8
<b>b. Pajak Perdagangan Internasional</b>	<b>49,3</b>	<b>31,3</b>	<b>63,4</b>
i. Bea Masuk	37,2	28,0	75,3
ii. Bea Keluar	12,1	3,2	26,7
<b>2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>	<b>269,1</b>	<b>206,7</b>	<b>76,8</b>
<b>a. Penerimaan Sumber Daya Alam</b>	<b>118,9</b>	<b>88,1</b>	<b>74,1</b>
i. Migas	81,4	64,7	79,5
ii. Non Migas	37,6	23,4	62,4
<b>b. Bagian Laba BUMN</b>	<b>37,0</b>	<b>35,5</b>	<b>96,0</b>
<b>c. PNBPN Lainnya</b>	<b>90,1</b>	<b>60,6</b>	<b>67,2</b>
<b>d. Pendapatan BLU</b>	<b>23,1</b>	<b>22,6</b>	<b>97,7</b>
<b>B. HIBAH</b>	<b>3,3</b>	<b>0,8</b>	<b>24,3</b>

(Sumber: Kemenkeu.go.id)

Dalam Tabel 1.1, pendapatan pajak di Indonesia sebesar 1.015,6 triliun Rupiah dari 1.223,1 triliun Rupiah total pendapatan negara. Presentase pendapatan pajak yaitu sebesar 83% dari total pendapatan negara. Hal tersebut menunjukkan komposisi terbesar pendapatan pemerintah berasal dari pajak. Oleh sebab itu,

masyarakat menginginkan pertanggungjawaban pemerintah atas uang masyarakat tersebut agar digunakan secara efisien dan tepat.

Pada tahun 2015 masih terdapat pemborosan beberapa pos belanja kementerian pada masa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro melansir adanya inefisiensi anggaran senilai Rp 8,92 triliun atau sekitar 1 persen dalam APBN 2015. Pemborosan didapati pada pos-pos belanja di beberapa kementerian. Kementerian-kementerian tersebut adalah Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Kebudayaan. Anggota Badan Anggaran DPR, Ahmad M. Ali menganggap pemborosan oleh ketiga kementerian tersebut merupakan potret buruknya formulasi kebijakan penganggaran. Menurutnya, selama ini kementerian tidak menggunakan paradigma penganggaran yang tepat. Mereka menggunakan anggaran yang sudah ditentukan oleh Presiden, bukan anggaran yang mengikuti perencanaan. "Politik anggaran yang saat ini berlaku adalah menunggu disahkannya dulu anggaran, lepas itu setiap kementerian merancang perencanaannya," ungkapnya. Menurut Ali, paradigma penganggaran semacam ini harus diubah. Langkah yang dapat ditempuh adalah dengan membuat sistem pengelolaan anggaran terpadu. Sistem pengelolaan tersebut berupa aturan penyelenggaraan kegiatan dan belanja pemerintah yang selama ini belum ada. "Aturan ini secara komprehensif mengenai aturan teknis. Semisal dalam agenda rapat-rapat, itu harus dijelaskan bahwa aturan teknisnya seperti apa. Jangan hanya himbuan yang melarang menggunakan hotel untuk rapat atau dilarang menggunakan pesawat Garuda Indonesia untuk pejabat pemerintah" tuturnya.

([www.tribunnews.com](http://www.tribunnews.com), 3 Mei 2016).

Pemerintah berupaya agar penganggaran pemerintah disusun lebih baik yaitu dengan menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017. Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menyampaikan beberapa harapan agar rencana kerja setiap Kementerian/Lembaga (K/L), terutama terkait belanja negara, dapat disusun dengan sebaik-baiknya. Langkah yang dilakukan pertama yaitu mensinergikan APBN dan APBD. Mendukung pembangunan di bidang infrastruktur seperti arahan Presiden serta pendidikan dan kesehatan, terutama di daerah perbatasan. Kedua, melakukan efisiensi belanja operasional dan penajaman belanja non-operasional serta modal non-infrastruktur di K/L. “Karena setelah kami bertemu dengan K/L di Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi APBN dan APBD (TEPRA), masih banyak terutama belanja modal dan barang yang mestinya bisa lebih dihemat lagi,” ungkap Mardiasmo. Selanjutnya, ia berharap agar setiap pengalokasian subsidi lebih tepat sasaran. “Kita saat ini udah reformasi subsidi BBM, yang belum hanya subsidi pupuk yang akan juga kita reformasi serta ada subsidi listrik,” tambahnya. Terakhir, terkait transfer daerah dan dana desa. “Ini kami harapkan peran bapak Gubernur dan Bupati, juga pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk dorong ekonomi daerah. DAK ini mungkinkah ada semacam DAK terpadu. Misalnya di masing-masing kabupaten/kota itu sinkron dan mendukung, tidak masing-masing bikin sendiri kemudian saat dilaksanakan malah tidak mendukung,” jelas Mardiasmo ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id), 3 Mei 2016).

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dan transparansi kepada

masyarakat, pemerintah terdorong untuk menerapkan dan meningkatkan akuntabilitas publik. Mardiasmo (2002) dalam Nordiawan (2010) mendefinisikan akuntabilitas sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban kepada publik yang memungkinkan pihak luar untuk memperoleh informasi biaya atas barang dan jasa yang diterima, serta memungkinkan mereka untuk menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya.

Upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah tersebut terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary report*), laporan finansial, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan keuangan pemerintah disusun dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.71 Tahun 2010.

Laporan keuangan pemerintah setiap tahunnya mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pemriksa Keuangan (BPK). Menurut UU No.15 Tahun 2004, terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*), Opini Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*), Opini Tidak Wajar (*adversed opinion*), dan Pernyataan Menolak memberi Opini (*disclaimer of opinion*). Ketika BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap LKPD, artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material. Untuk mendapatkan opini yang

wajar tanpa pengecualian, maka pemerintah harus menyajikan laporan yang berkualitas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku.

Seperti contoh penilaian BPK atas laporan keuangan Pemerintah Kota Depok. Dalam situs resmi Pemerintah Kota Depok ([www.depok.go.id](http://www.depok.go.id)) terdapat salah satu artikel yang menyatakan bahwa Pemerintah Kota Depok telah mendapatkan penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama empat tahun berturut-turut atas laporan keuangan yang dibuat. Penghargaan diserahkan langsung oleh kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan provinsi Jawa Barat, Cornell Syarif Prawiradiningrat kepada Walikota Depok, Nur Mahmudi Isma'il di aula kantor BPK di Bandung pada hari Rabu 27 Mei 2015. Hal tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan pada pemerintah kota Depok berkualitas baik menurut penilaian BPK dan sesuai dengan SAP yang berlaku.

Dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) pada PP No. 71 Tahun 2010 terdapat karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah daerah yaitu: relevan (informasi dalam laporan keuangan memungkinkan pengguna mengevaluasi pencapaian di masa lalu, dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya, disajikan tepat waktu, dan lengkap), andal (informasi dalam laporan menggambarkan secara jujur transaksi yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan, dapat diuji lebih dari sekali dengan hasil yang tidak jauh berbeda, dan tidak berpihak kepada pihak tertentu), dapat dibandingkan (informasi pada laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan pada periode sebelumnya dan pelaporan lainnya pada umumnya), dan dapat dipahami (informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami dan dalam



bentuk serta istilah yang sesuai dengan batas pemahaman penggunaannya).

Laporan keuangan pemerintah daerah digunakan oleh beberapa pihak untuk berbagai kepentingan, yaitu pihak pemerintah untuk mengevaluasi kinerja dan pengambilan keputusan, masyarakat untuk memonitor kinerja dan pertanggungjawaban pemerintah atas uang rakyat (pajak), *investor* atau *vendor* untuk melihat kepastian pembayaran dari pemerintah yang digunakan untuk membuat keputusan dalam pengadaan barang atau jasa (ada penganggaran untuk barang atau jasa tersebut atau tidak), serta BPK atau *auditor* untuk memberikan penilaian atas kewajaran laporan keuangan tersebut. Karena pentingnya informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah bagi berbagai pihak, maka laporan keuangan yang disusun harus berkualitas. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, pemerintah daerah harus memperhatikan aspek efektivitas penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah.

Sejalan dengan harapan pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah berusaha mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dengan cara membangun teknologi informasi di bidang keuangan atau akuntansi dalam kaitannya pengelolaan keuangan daerah yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). SIPKD merupakan aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah (Dewi dan Mimba, 2014).



Efektivitas penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari keamanan data, kecepatan akses, ketepatan waktu akses, ketelitian, variasi laporan yang dihasilkan, dan relevansi sistem dengan pengguna.

SIPKD yang efektif memberikan keamanan dengan pembatasan akses, sehingga meningkatkan keandalan laporan keuangan karena data hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki wewenang. Kecepatan akses dan variasi laporan yang dihasilkan SIPKD membuat laporan keuangan semakin relevan (laporan disajikan tepat waktu dan lengkap) dan memungkinkan laporan keuangan untuk dibandingkan. Dengan SIPKD, proses penyusunan laporan keuangan menjadi lebih teliti, sehingga laporan keuangan menjadi andal karena konsistensi informasi terjaga dan terbebas dari kesalahan pencatatan. Jika SIPKD sesuai dengan maksud pengguna (relevan), maka laporan keuangan lebih mudah dipahami dan dapat digunakan sebagai evaluasi pencapaian. Berdasarkan hal-hal tersebut, dapat dinyatakan bahwa semakin tinggi efektivitas penerapan SIPKD, maka laporan keuangan yang disusun menggunakan SIPKD tersebut semakin berkualitas.

Dewi dan Mimba (2014) telah membuktikan bahwa efektivitas penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Evicahyani dan Setiawan (2016) juga membuktikan bahwa penerapan SIPKD berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Subadriyah dan Rahayuningsih (2015) membuktikan bahwa sistem informasi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor yang mempunyai proporsi

terbesar dalam menerapkan variasi dari kerja dibandingkan dari strategi dan faktor-faktor lainnya. SDM yang kompeten dalam penyusunan laporan keuangan, yaitu karyawan yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan yang diberikan sesuai dengan peranan dan pedoman akuntansi yang ada, serta memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang akuntansi yang memadai sehingga laporan keuangan yang disusun oleh karyawan tersebut terbebas dari kesalahan pencatatan. Kompetensi SDM dapat didukung oleh pelatihan-pelatihan dalam bidang akuntansi yang diterima.

SDM yang kompeten memiliki pengetahuan akuntansi yang baik, lebih cepat dalam menyusun laporan keuangan, sehingga laporan keuangan menjadi relevan (disajikan tepat waktu) dan penyusunan laporan keuangan dilakukan menggunakan bahasa akuntansi yang mudah dipahami oleh pengguna laporan keuangan. SDM yang bekerja sesuai dengan peran dan pedoman yang ada, dapat menghasilkan laporan keuangan yang jujur dan tidak berpihak. Pengalaman akuntansi yang dimiliki SDM membantu meminimalisir kesalahan pencatatan pada laporan keuangan, sehingga meningkatkan keandalan laporan keuangan tersebut. Berdasarkan hal-hal tersebut, dapat dinyatakan bahwa semakin tinggi kompetensi SDM, maka laporan keuangan yang disusun oleh SDM tersebut semakin berkualitas.

Evicahyani dan Setiawan (2016) telah membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Subadriyah (2015) juga membuktikan bahwa kualitas SDM memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Seiring dengan berkembangnya jaman, perusahaan sektor swasta maupun sektor publik kini mengembangkan teknologi informasi untuk kegiatan operasional maupun penyusunan laporan keuangan. Teknologi informasi tersebut terdiri dari komputer dan sistem informasi (sebagai alat pemrosesan), *database* (sebagai alat penyimpanan), dan jaringan (sebagai penghubung dan sarana pertukaran informasi). Besarnya kontribusi teknologi informasi atau pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan laporan keuangan dapat dilihat dengan seberapa sering pegawai atau karyawan kantor pemerintahan menggunakan fasilitas komputer dan internet yang diberikan dengan baik dalam mengolah data keuangan yang akan disusun menjadi laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi akan lebih baik apabila sarana (komputer) pada kantor pemerintahan yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan dipelihara dan dirawat secara teratur.

Pemanfaatan teknologi informasi (komputer dan internet) dalam penyusunan laporan keuangan membantu mempercepat proses penyusunan, sehingga laporan keuangan dapat disajikan tepat waktu (relevan). Penggunaan teknologi informasi juga meminimalisir kesalahan pencatatan sehingga meningkatkan keandalan laporan keuangan. *Database* komputer mampu menyimpan data keuangan dengan kapasitas yang besar, sehingga pengguna dapat mengakses data keuangan tahun lalu dan mengakses laporan keuangan lainnya sekaligus, sehingga memungkinkan laporan keuangan untuk dapat dibandingkan. Berdasarkan hal-hal tersebut, dapat dinyatakan bahwa semakin besar pemanfaatan teknologi informasi, maka laporan keuangan yang dihasilkan teknologi

informasi tersebut semakin berkualitas.

Yosefrinaldi (2013) telah membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Yudianta dan Erawati (2012) juga membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh positif terhadap kualitas informasi pada pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Untuk mewujudkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas maka diperlukan prosedur dan sistem pengendalian dalam proses penyusunan laporan keuangan yaitu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Menurut PP No. 60 Tahun 2008, penerapan SPIP meliputi: lingkungan pengendalian (adanya kode etik dan pimpinan memberikan contoh baik dalam mengikuti kode etik), penilaian risiko (batas, toleransi, pengendalian intern, dan manajemen terhadap risiko), kegiatan pengendalian (otorisasi dan pemisahan tugas), informasi dan komunikasi (penerapan sistem informasi dalam pelaksanaan tanggung jawab yang memungkinkan untuk di audit), dan pemantauan oleh pimpinan (pemantauan atas catatan akuntansi).

Dalam kantor pemerintahan yang menerapkan komponen sistem pengendalian intern pemerintah yaitu lingkungan pengendalian, akan meningkatkan kesadaran karyawan dalam menyusun laporan keuangan, sehingga laporan keuangan disusun sesuai dengan peraturan dan jujur (laporan keuangan menjadi andal). Batasan-batasan dan otorisasi membuat laporan keuangan hanya dapat disusun hanya oleh pihak keuangan yang independen, sehingga laporan keuangan yang disusun tidak menguntungkan atau merugikan pihak tertentu.

Pemantauan oleh pimpinan (pemantauan atas catatan akuntansi) membuat laporan keuangan disusun sesuai pedoman dan terbebas dari kesalahan pencatatan, sehingga meningkatkan keandalan laporan keuangan. Berdasarkan hal-hal tersebut, dapat dinyatakan bahwa semakin baik sistem pengendalian intern pemerintah diterapkan dalam suatu kantor pemerintahan, maka laporan keuangan yang dihasilkan oleh kantor tersebut semakin berkualitas.

Evicahyani dan Setiawan (2016) telah membuktikan bahwa penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Herawati (2014) juga membuktikan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Dewi dan Mimba (2014) yang memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu:

1. Penambahan variabel independen kompetensi sumber daya manusia (SDM), dan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah yang mengacu pada penelitian Evicahyami dan Setiawan (2016), serta menambah variabel independen pemanfaatan teknologi informasi yang mengacu pada penelitian Yosefrinaldi (2013). Variabel-variabel tersebut ditambahkan karena variabel tersebut juga merupakan aspek yang penting dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas
2. Objek yang digunakan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di wilayah Depok. Penelitian sebelumnya adalah SKPD di kota Denpasar. Obyek ini dipilih karena Depok memperoleh opini WTP selama 4

tahun berturut-turut.

3. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2016, sedangkan penelitian sebelumnya dilaksanakan pada tahun 2014.

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang tersebut, maka judul penelitian ini adalah: **“Pengaruh Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” (Studi Empiris Pada SKPD Wilayah Depok).**

## **1.2 Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka batasan dalam penelitian ini adalah:

1. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, tetapi dalam penelitian ini menggunakan 4 faktor, yaitu efektivitas penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah.
2. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wilayah Depok. Responden yang dipilih yaitu pegawai yang menggunakan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, ikut serta dalam penyusunan laporan keuangan, dan menggunakan informasi dalam laporan keuangan untuk pengambilan keputusan di SKPD wilayah Depok.
3. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2016.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah efektivitas penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah penerapan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh efektivitas penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Pengaruh penerapan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.



## 1.5 Manfaat Penelitian

### 1. Bagi Kantor SKPD

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan positif bagi kantor SKPD. Pertama untuk pembangunan dan investasi dalam sistem informasi, serta teknologi untuk mendukung sistem informasi tersebut. Kedua untuk upaya peningkatan kompetensi karyawan dan memperbaiki penerapan pengendalian intern, sehingga penyusunan laporan keuangan akan menuju kearah yang lebih baik dan informasi pada laporan keuangan berguna dalam pengambilan keputusan.

### 2. Bagi Regulator

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh regulator sebagai acuan atas referensi pembangunan sistem informasi, pengembangan kompetensi pegawai, penerapan teknologi informasi, dan pengendalian intrern pada pemerintah, sehingga dapat menciptakan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas sesuai peraturan yang berlaku dan meningkatkan kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintah, karena pemerintah melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dengan baik.

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan nantinya dapat dijadikan referensi konseptual bagi penelitian selanjutnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan kemajuan dunia pendidikan akuntansi khususnya untuk sistem informasi akuntansi.

#### 4. Bagi Penulis

- a. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan bukti empiris tentang pengaruh efektivitas penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- b. Dapat dijadikan sebagai pembelajaran bagi peneliti dalam menganalisis dan memperdalam pengetahuan tentang penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern pemerintah, dan kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah. Selain itu, dapat digunakan untuk melihat faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga dapat bermanfaat untuk ke depannya.

### 1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, sistematika pembahasan terdiri atas lima bab, masing-masing berisi uraian sebagai berikut:

#### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### BAB II : TELAAH LITERATUR

Bab ini terdiri atas penjelasan pembahasan secara rinci terkait

organisasi sektor publik dan pemerintah daerah. Teori terkait laporan keuangan pemerintah daerah, sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern pemerintah yang di dalamnya terdapat indikator pengukuran masing-masing variabel independen dan pengaruhnya terhadap variabel dependen, serta pengembangan hipotesis dan model penelitian.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan mengenai pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, unit analisis yang digunakan, populasi dan sampel yang dipakai, sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel dan pengukurannya, serta metode statistik yang digunakan untuk menganalisis data.

### **BAB IV : ANALIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini terdiri dari objek penelitian, deskripsi penelitian berdasarkan data-data yang dikumpulkan, pengujian dan analisis hipotesis, serta pembahasan hasil penelitian.

### **BAB V : SIMPULAN DAN SARAN**

Bab terakhir ini terdiri atas simpulan, keterbatasan, dan saran yang didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan.